



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 8 No. 1 Tahun 2026

Dari Regulasi ke Realitas: Menjembatani
Kesenjangan Implementasi *Good
Agricultural Practices* (GAP) di ASEAN

Penulis

Daffa Ibra Danendra¹, Tanti Novianti², Nia Kurniawati Hidayat¹

¹ Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, IPB University

² Sekolah Bisnis, IPB University

Dari Regulasi ke Realitas: Menjembatani Kesenjangan Implementasi *Good Agricultural Practices* (GAP) di ASEAN

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Disparitas kinerja pertanian ASEAN lebih ditentukan oleh kesenjangan implementasi *Good Agricultural Practices* dibandingkan keberadaan regulasi formal. Perbedaan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia petani, dan efektivitas penyuluhan menyebabkan adopsi GAP bersifat parsial dan tidak berkelanjutan di banyak negara.
- 2) Integrasi perdagangan pertanian ASEAN berlangsung lebih cepat daripada kesiapan sistem produksi domestik. Lemahnya keterkaitan GAP dengan kebijakan hilirisasi dan insentif pasar menyebabkan peningkatan ekspor tidak selalu diikuti peningkatan efisiensi teknis maupun kesejahteraan petani.
- 3) Ketidaksinkronan antara GAP dan kebijakan lingkungan melemahkan pencapaian efisiensi lingkungan. Keterbatasan pengawasan lapang serta sistem monitoring dan pelaporan emisi membuat praktik budidaya tidak berkelanjutan sulit dikendalikan meskipun komitmen iklim telah diadopsi secara formal.

Ringkasan

Disparitas implementasi *Good Agricultural Practices* (GAP) di kawasan ASEAN mencerminkan perbedaan mendasar dalam kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia petani, serta kesiapan sistem produksi domestik antar negara anggota. Meskipun hampir seluruh negara ASEAN telah mengadopsi standar GAP secara formal, efektivitas implementasinya sangat bervariasi dan umumnya bersifat parsial, terutama di negara berpendapatan rendah hingga menengah bawah. Kesenjangan ini menyebabkan GAP belum berfungsi sebagai instrumen transformasi produktivitas dan efisiensi sektoral secara merata. Di sisi lain, integrasi perdagangan pertanian dan ekspansi ekspor berlangsung lebih cepat dibandingkan penguatan fondasi produksi domestik. Ketidakterpaduan antara GAP, kebijakan input produksi, pengawasan lapang, serta hilirisasi menyebabkan peningkatan perdagangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan efisiensi teknis dan efisiensi lingkungan. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut justru memicu inefisiensi penggunaan input dan degradasi lingkungan. Policy brief ini menekankan bahwa harmonisasi standar GAP di tingkat regional perlu disertai dengan penguatan kapasitas implementasi nasional, integrasi insentif pasar, serta sinkronisasi dengan kebijakan lingkungan agar GAP dapat berkontribusi nyata terhadap kinerja pertanian ASEAN yang berkelanjutan.

Kata kunci: ASEAN, disparitas kebijakan, efisiensi pertanian, *good agricultural practices*, integrasi perdagangan

Pendahuluan

Good Agricultural Practices (GAP) telah menjadi pilar utama kebijakan pertanian di kawasan ASEAN dalam upaya meningkatkan produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan lingkungan. Hampir seluruh negara anggota telah mengadopsi kerangka regulasi GAP secara formal, sejalan dengan tuntutan keamanan pangan, standar perdagangan internasional, dan komitmen keberlanjutan sektor pertanian. Namun demikian, keseragaman regulasi tersebut tidak tercermin secara proporsional dalam kinerja sektor pertanian antar negara ASEAN. Variasi efisiensi teknis, efisiensi lingkungan, serta daya saing komoditas menunjukkan bahwa tantangan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan kesenjangan implementasi kebijakan di tingkat nasional dan lapangan.

Disparitas implementasi GAP di ASEAN dipengaruhi oleh heterogenitas tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia petani, serta karakteristik geografis antar negara anggota (Danendra *et al.* 2025). Negara dengan basis fiskal dan kelembagaan yang lebih kuat, seperti Malaysia dan Thailand, mampu mengintegrasikan GAP dengan sistem penyuluhan, sertifikasi, serta insentif pasar, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing pertanian. Sebaliknya, di negara berpendapatan rendah hingga menengah bawah seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar, penerapan GAP masih bersifat parsial, berbasis proyek, dan menghadapi kendala serius dalam hal kapasitas implementasi (Rahayu *et al.* 2024; Hapsari *et al.* 2025).

Kesenjangan implementasi ini diperparah oleh ketidaksinkronan antara GAP dengan kebijakan input produksi, pengawasan lapang, serta kebijakan perdagangan dan hilirisasi. Keterbatasan subsidi pupuk yang tepat sasaran, lemahnya pengawasan lapang akibat kendala geografis, serta minimnya integrasi GAP dengan rantai nilai dan industri pengolahan menyebabkan peningkatan ekspor pertanian tidak selalu diikuti oleh

peningkatan efisiensi teknis maupun kesejahteraan petani (Villegas dan Mendoza 2015; Nie *et al.* 2022; Saadah 2020; Yoshida 2022). Dalam konteks ini, integrasi perdagangan justru berpotensi memperbesar kebocoran nilai dan ketergantungan pada pasar eksternal bernilai tambah tinggi (Trakem dan Fan 2024; Hara 2025).

Dari perspektif lingkungan, meskipun sektor pertanian telah dimasukkan dalam komitmen iklim nasional melalui *Nationally Determined Contributions* (NDC's), kualitas sistem *monitoring, reporting, and verification* (MRV) serta integrasinya dengan praktik GAP masih sangat timpang antar negara ASEAN (FAO 2022). Ketidakterpaduan tersebut menyebabkan kebijakan mitigasi emisi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik budidaya, sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi lingkungan sektor pertanian. Sejalan dengan literatur, integrasi perdagangan pertanian tanpa kesiapan institusional dan implementasi kebijakan yang memadai berisiko meningkatkan tekanan lingkungan dan memperlebar kesenjangan produktivitas antar negara (Anwar *et al.* 2024).

Hal tersebut menegaskan bahwa tantangan utama GAP di ASEAN bukan pada aspek regulasi, melainkan pada kemampuan menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi. Tanpa penguatan kapasitas nasional dan sinkronisasi lintas kebijakan, GAP berisiko menjadi standar administratif yang tidak efektif dalam mendorong transformasi efisiensi pertanian regional.

Standar yang Sama, Kapasitas Implementasi yang Berbeda

Hampir seluruh negara ASEAN telah mengadopsi *Good Agricultural Practices* (GAP) sebagai standar formal dalam kebijakan pertanian nasional. Namun, keseragaman regulasi tersebut tidak menghasilkan kinerja sektoral yang seragam. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas fiskal, dan kekuatan kelembagaan menyebabkan implementasi GAP berjalan sangat heterogen antar negara anggota (Danendra *et al.*

2025). Negara dengan basis industri dan sistem administrasi yang relatif kuat, seperti Malaysia dan Thailand, mampu mengintegrasikan GAP dengan sistem penyuluhan, sertifikasi, serta strategi pemasaran. Sebaliknya, di negara berpendapatan rendah hingga menengah bawah seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar, GAP masih bersifat parsial dan berbasis proyek.

Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan utama GAP di ASEAN bukan pada desain regulasi, melainkan pada kemampuan negara dalam menerjemahkan standar ke dalam praktik produksi. GAP kerap berfungsi sebagai persyaratan administratif, bukan sebagai instrumen transformasi produktivitas. Dari perspektif kebijakan, kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan diferensial dalam harmonisasi GAP di

tingkat regional, dengan mempertimbangkan kapasitas implementasi nasional.

GAP, Petani Kecil, dan Kesenjangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Adopsi GAP sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia petani dan efektivitas sistem penyuluhan nasional. Standar GAP menuntut kemampuan pencatatan usaha tani, pemahaman teknis penggunaan input, serta kesadaran terhadap aspek lingkungan, yang tidak mudah dipenuhi oleh petani kecil dengan tingkat pendidikan rendah (Rahayu *et al.* 2024; Hapsari *et al.* 2025). Di banyak negara ASEAN, keterbatasan jumlah dan jangkauan penyuluh memperlemah proses pendampingan yang berkelanjutan.

Tabel 1 Identifikasi ketimpangan dalam implementasi beberapa kebijakan secara fungsional dan struktural sektor pertanian Kawasan ASEAN

Negara	A	B	C	D	E	F	G	H
Brunei Darussalam	△	✓	✗	✓	△	△	✗	△
Kamboja	✓	✓	△	✓	△	△	✗	△
Indonesia	✓	✓	✓	✓	△	✓	✓	✓
Laos	△	✓	✓	✓	✗	△	✗	△
Malaysia	✓	✓	△	✓	✓	✓	✓	✓
Myanmar	△	✓	✗	△	✗	△	✗	✓
Filipina	✓	✓	△	✓	△	✓	✓	✓
Singapura	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Thailand	✓	✓	△	✓	✓	✓	✓	✓
Vietnam	✓	✓	△	✓	△	✓	✓	✓

Sumber: Data hasil olahan penulis

Keterangan:

- A: Tingkat adopsi GAP (*national GAP*)
- B: Registrasi dan mutu pupuk
- C: Program regulasi/subsidi pupuk
- D: Panduan Nutrisi dan Tanah
- E: Pengawasan Lapang
- F: Kebijakan Perdagangan dan Hilirisasi
- G: Program Hilirisasi Aktif
- H: Kebijakan Lingkungan (AFOLU/Emisi) dan *Climate Smart Agriculture*
- ✓: Sudah diimplementasikan penuh, ada kendala minor
- △: Sebagian diimplementasikan/data terbatas
- ✗: Belum diimplementasikan/ regulasi belum ada

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa GAP di negara seperti Laos dan Myanmar masih terkonsentrasi pada kelompok petani tertentu dan wilayah proyek, sehingga dampaknya terhadap produktivitas nasional relatif terbatas. Sebaliknya, di Malaysia dan Thailand, integrasi GAP dengan sistem sertifikasi ekspor dan insentif pasar menciptakan dorongan ekonomi yang nyata bagi petani untuk beradaptasi. Temuan ini menegaskan bahwa GAP tidak dapat berdiri sendiri tanpa investasi kebijakan pada penguatan kapasitas petani kecil sebagai aktor utama produksi.

Ketidaksinkronan GAP dengan Kebijakan Input dan Pengawasan Lapang

Disparitas implementasi GAP juga tercermin dalam kebijakan input produksi, khususnya subsidi pupuk dan pengawasan lapang. Negara dengan kapasitas fiskal relatif kuat seperti Indonesia dan Vietnam masih mempertahankan subsidi pupuk dalam skala besar, meskipun menghadapi persoalan inefisiensi dan distorsi penggunaan input (Villegas dan Mendoza 2015; Nie *et al.* 2022). Sebaliknya, Thailand dan Malaysia mulai bergeser ke pendekatan subsidi selektif dan peningkatan efisiensi distribusi, sementara negara berpendapatan rendah hanya mampu menyediakan bantuan terbatas yang sering bergantung pada donor internasional.

Pada saat yang sama, efektivitas pengawasan lapang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Negara daratan dengan topografi sulit seperti Laos, maupun negara kepulauan besar seperti Indonesia dan Filipina, menghadapi tantangan serius dalam konsistensi inspeksi dan penegakan standar (Saadah 2020; Yoshida 2022). Kelemahan pengawasan tersebut berdampak langsung pada rendahnya efisiensi teknis dan meningkatnya risiko degradasi lingkungan akibat penggunaan input yang tidak terkendali.

GAP, Perdagangan, dan Kebocoran Nilai Tambah

Disparitas paling mencolok dalam implementasi GAP muncul ketika dikaitkan dengan kebijakan perdagangan dan hilirisasi. Negara dengan akses maritim strategis, infrastruktur logistik maju, dan basis industri pengolahan yang kuat seperti pada Negara Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki kapasitas lebih besar untuk mengonversi produksi primer menjadi produk bernilai tambah tinggi. Sebaliknya, negara *landlocked* seperti Laos atau negara dengan instabilitas politik seperti Myanmar cenderung mengeksport komoditas mentah dengan nilai tambah rendah (Hara 2025).

Keterbatasan integrasi GAP dengan kebijakan hilirisasi menyebabkan terjadinya kebocoran nilai, di mana peningkatan ekspor tidak secara proporsional meningkatkan kesejahteraan petani maupun efisiensi sistem produksi domestik (Trakem dan Fan 2024). Hal tersebut memperkuat argumen bahwa GAP perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi rantai nilai, bukan sekadar standar budidaya di tingkat hulu.

GAP dan Tantangan Efisiensi Lingkungan

Meskipun hampir seluruh negara ASEAN telah memasukkan sektor pertanian dalam komitmen iklim melalui *Nationally Determined Contributions* (NDC's), kualitas implementasi kebijakan lingkungan masih sangat timpang. Negara dengan kapasitas statistik dan kelembagaan yang kuat mampu menyusun inventarisasi emisi yang relatif konsisten, sementara negara berpendapatan rendah masih bergantung pada estimasi kasar dan dukungan eksternal (FAO 2022).

Ketidaksinkronan antara GAP dan kebijakan lingkungan menyebabkan praktik budidaya berkelanjutan sulit diinternalisasi di tingkat petani. Sejalan dengan literatur, integrasi perdagangan pertanian tanpa kesiapan institusional dan implementasi kebijakan yang memadai berisiko

meningkatkan tekanan lingkungan dan memperlebar kesenjangan produktivitas antar negara ASEAN (Anwar *et al.* 2024). Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas GAP sangat bergantung pada integrasi lintas kebijakan, bukan sekadar keberadaan standar formal.

Rekomendasi

Pertama, harmonisasi GAP di tingkat ASEAN perlu diarahkan pada penguatan kapasitas implementasi, bukan sekadar penyeragaman regulasi. Kerangka GAP regional harus adaptif terhadap perbedaan kapasitas fiskal, kelembagaan, dan sumber daya manusia antar negara anggota.

Kedua, penguatan kapasitas petani kecil dan sistem penyuluhan perlu diposisikan sebagai inti kebijakan GAP. Investasi pada pelatihan berbasis praktik, pendampingan berkelanjutan, serta integrasi GAP dengan insentif pasar akan meningkatkan adopsi dan keberlanjutan implementasi.

Ketiga, sinkronisasi GAP dengan kebijakan input produksi dan pengawasan lapang harus diperkuat melalui reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran dan berbasis rekomendasi agronomis, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas monitoring.

Keempat, integrasi GAP dengan kebijakan perdagangan dan hilirisasi perlu diperjelas agar ekspansi ekspor diikuti oleh peningkatan nilai tambah domestik dan penguatan rantai nilai pertanian regional.

Kelima, penyelarasan GAP dengan kebijakan lingkungan dan komitmen iklim harus diperkuat melalui sistem monitoring, reporting, and verification yang konsisten untuk mendorong efisiensi teknis dan lingkungan pertanian ASEAN secara simultan.

Kesimpulan

Disparitas implementasi *Good Agricultural Practices* di kawasan ASEAN menegaskan bahwa keberadaan regulasi dan standar regional belum secara otomatis meningkatkan efisiensi teknis

maupun efisiensi lingkungan sektor pertanian. Kritik utama terhadap pendekatan kebijakan saat ini adalah kecenderungan menekankan harmonisasi standar tanpa diiringi penguatan kapasitas implementasi di tingkat petani dan kelembagaan nasional. Dalam kondisi tersebut, GAP berisiko menjadi instrumen administratif yang memenuhi kepatuhan formal namun minim dampak transformasional. Ketidaksinkronan GAP dengan kebijakan input, pengawasan lapang, perdagangan, dan lingkungan semakin memperlebar kesenjangan kinerja antar negara. Tanpa koreksi terhadap orientasi kebijakan yang terlalu normatif dan kurang adaptif terhadap realitas struktural, integrasi pertanian ASEAN justru berpotensi mereproduksi inefisiensi dan ketimpangan sektoral.

Daftar Pustaka

- Anwar A, Mifrahi MN, Kusairee MABZA. 2024. International trade and economic growth in ASEAN. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 109-115. doi:10.20885/JKEK.vol3.iss1.art14
- Danendra DI, Hidayat NK, Amanda D. 2025. The impact of ASEAN+ 6 Sustainable policies on Indonesia's cocoa butter trade. In *BIO Web of Conferences*. 171(04011): 1-17. doi: 10.1051/bioconf/202517104011
- Hara M. 2025. Conceptualizing the land-locked developing trap in ASEAN: A strategic perspective from Lao People's Democratic Republic. *International Journal of Socio-Economic Development and Digital Innovation*. 1-15. doi: 10.70122/ijdsdi.v1i1.1
- Hapsari H, Saidah Z, Ghani MI, Kartika N. 2025. Hubungan karakteristik petani dengan tingkat adopsi good agriculture practices (GAP) dan pendapatan usaha tani. *Jurnal Pertanian Agros*. 27(1): 67-76. doi:10.37159/jpa.v27i1.36
- Nie F, Li J, Bi X, Li G. 2022. Agricultural trade liberalization and domestic fertilizer use: Evidence from China-ASEAN free trade agreement. *Ecological Economics*. 195:

107341. doi:
10.1016/j.ecolecon.2022.107341

Rahayu MP, Rahayu SA, Mutttaqin NZ, Reza M. 2024. Peluang Dan Ancaman Perdagangan Bebas Negara Asean Komoditi Pertanian: Studi Kasus Indonesia Dan Kamboja. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* [diakses 2025 Desember 25]. 1(4): 892-900. Tersedia pada:
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/download/1039/931>

Saadah K. 2020. Laos dan Pemanfaatan Keterjepitan Geografis. *Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, 155.

Trakem V, Fan H. 2024. Agricultural trade liberalization, governance quality, and technical efficiency in the agricultural sector of Southeast Asia. *Heliyon*. 10(21): 1-20. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e39553

Villegas PM, Mendoza TC. 2015. Opportunities and Challenges for Green Agriculture in the ASEAN: Focus on the Philippines. In *Plenary Paper presented during the 50th PAEDA Convention, Legaspi City, Albay*

Yoshida YH. 2022. Ketergantungan Laos Pada Tiongkok Dalam Ekonomi Dan Pembangunan Sebagai Penghambat Terlaksananya Program Reduce Inequality. *Indonesian Journal of International Relations*. 6(1): 67-86. doi: /10.32787/ijir.v6i1.298



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Daffa Ibra Danendra, merupakan mahasiswa sarjana lulusan Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan FEM IPB pada tahun 2025. Penulis melanjutkan studinya kembali pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian FEM IPB melalui program Sinergi S1-S2. Penulis aktif mengikuti beragam kompetisi, conferences, maupun riset yang terpublikasi. Selama studi sarjana, penulis memperoleh lebih dari 25 penghargaan kompetisi sebagai pemenang dan Certificate of Appreciation as a Speaker. Penulis juga memiliki beberapa publikasi yang terindeks baik Scopus maupun SINTA.

(Corresponding Author)

Email: daffaibradane@gmail.com



Tanti Novianti, merupakan dosen tetap PNS di IPB University sejak 1998 dan mengampu Mata Kuliah Ekonomi, Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonomi Ketenagakerjaan, Perdagangan Internasional, Global Bisnis dan Bisnis Internasional. Penulis lulus S1, S2 dan S3 pada Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, serta Ilmu Ekonomi Pertanian, IPB University, pada tahun 1996, 2003 dan 2013. Penulis juga aktif di asosiasi profesi ISEI dan PERHEPI, serta aktif menulis artikel di berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel di koran, serta menjadi Tenaga Ahli dan narasumber di beberapa kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Bappenas.



Nia Kurniawati Hidayat, merupakan dosen dan peneliti di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University dengan keahlian utama di bidang ekonomi pertanian, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pertanian berkelanjutan, serta kajian kesejahteraan petani kecil. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya di IPB (2008), S2 Ilmu Ekonomi Pertanian di IPB (2012), dan meraih gelar PhD Sustainability Science and Policy dari Maastricht University, Belanda, dengan fokus riset pada dampak sertifikasi sawit berkelanjutan terhadap kehidupan petani di Indonesia. Karya-karyanya banyak membahas isu livelihood, sertifikasi keberlanjutan, pembangunan pedesaan, dan ekonomi pertanian termasuk yang keterkaitan isu dampak perubahan iklim terhadap petani dan adopsi CSA sebagai Upaya mitigasi perubahan iklim dalam pertanian.

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680